BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Bertitik tolak kepada pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan dari Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 salah satu di antaranya adalah mendukung tertib administrasi dengan membenahi kepemilikan dokumen penduduk dan identitas individu penduduk.
2. Sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berjumlah 101 orang tetapi yang terpakai dalam implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 hanya sebanyak 30. Sumberdaya fmansial yang dianggarkan Pemerintah Kota Bandung sebesar ±Rp. 900 juta melalui APED, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung melakukan efisiensi waktu Sembilan bulan dari bulan Januari sampai bulan September tahun 2007
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berusaha untuk terbuka terhadapa pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan memberitahu berapa jumlah yang harus dibayar dalam pembuatan KTP, KK. Para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bandung mempunyai sifat demokrasi dengan menerima kritik dan saran terhadap pemberian pelayana.

4. Dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 terdapat struktur birokrasi untuk pembagian tugas. Para pelaksana dalam menjalankan tugasnya sudah berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku. Antar pelaksana sudah melakukan hubungan kerja yang baik.
5. Penyampaian informasi dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 dilakukan melalui pemasangan spanduk-spanduk, pemasangan stiker-stiker disetiap rumah penduduk, melalui media massa baik radio, televisi, dan melalui internet.
6. Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 didukung oleh Pemerintah Kota dengan mengeluarkan Keputusan Walikota, masyarakat dan para elite politik.

Berdasarkan kepada uraian dari kesimpulan di atas, bahwa yang paling menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2007 adalah kurangnya sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya fmansial atau modal, sumberdaya waktu pelaksanaan, dan pelaksanaan teknis.

1.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung agar dapat lebih meningkatkan pelayanan publiknya. Jaringan komputer yang sudah dibuat untuk kedepannya lebih dapat diterapkan secara *online*
2. Para pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk lebih meningkatkan lagi keahliannya dalam jaringan komputer berbasis database kependudukan
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam melaksanakan peningkatan pelayanan lebih meingkatkan sifat kejujuran, sifat tanggungjawab dan lebih lagi demokratis dalam menerima kritik dan saran
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung lebih meningkatkan pola-pola hubungan dengan masyarakat, maupun instansi lainnya dan mentaati kepada peraturan yang telah ada
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung lebih meningkatkan pola-pola hubungan dengan masyarakat, maupun instansi lainnya dan mentaati kepada peraturan yang telah ada
6. Pemerintah Kota atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung lebih meningkatkan dukungan dari berbagai pihak agar dapat tercapai keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Bandung tahun 2007.